# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Wilayah Pinggiran

Wilayah pinggiran merupakan wilayah pinggiran kota yang memiliki karakteristik yang khas baik secara sosial maupun fisik lingkungan. Di dalam berbagai literatur istilah wilayah pinggiran kota disebut juga sebagai wilayah pinggiran, periurban, suburban dan *urban fringe*.

Menurut Koestoer (1997:4-5), konsep dasar wilayah pinggiran termasuk di dalamnya tentang penjabaran suatu region sebagai wilayah peralihan, sebagai tempat bermukim masyarakat wilayah pinggir kota dan dengan demikian juga semua aspek interaksi, perilaku sosial dan struktur fisik secara spasial. Perkembangan wilayah ini sangat tergantung pada sistem spasial yang lebih tinggi. Sedangkan di dalam konteks spasial, Koestoer (1997:4-5) menjelaskan bahwa pada umumnya wilayah pinggiran terletak sekitar 15-25 kilometer dari pusat kota. Berikut ini adalah letak wilayah pinggiran di dalam sistem hirarki keruangan perkotaan menurut Koestoer (1997:51)

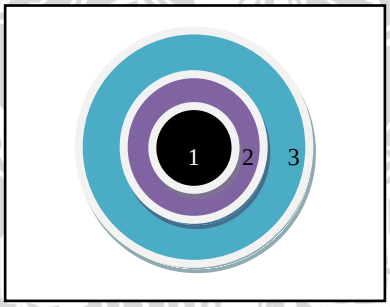


**Gambar 2.1 Sistem hirarki keruangan wilayah perkotaan**
Sumber: Koestor (1997:51)

Keterangan:

1. *City*, yaitu pusat kota atau inti kota
2. Wilayah tengah, yaitu area yang lokasinya dekat dengan pusat kota
3. Wilayah pinggir, yaitu area yang lokasinya mengelilingi wilayah tengah dan merupakan daerah peralihan antara kota dan desa.

Pada dasarnya wilayah pinggiran memiliki konotasi yang sangat luas. Menurut Russwurm dalam Qomariyah (2007:17), wilayah pinggiran secara fisik dapat diklasifikasikan berdasarkan jarak fisik yang biasanya mencakup radius 50 km dalam suatu kota. Wilayah tersebut masih dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu wilayah bagian dalam dan wilayah bagian luar. Wilayah bagian dalam mencakup daerah sekitar 10-15 km dimana masih terlihat batas-batas fisik perluasan suatu kota. Wilayah bagian

luar mencakup daerah perluasan antara 22-50 km dan berakhir pada suatu bayangan kota dimana pengaruh suatu kota sudah berkurang.

### 2.1.1 Karakteristik wilayah pinggiran

Menurut Bar-Gar dalam Koestoer (1997: 4-5), wilayah pinggiran kota ditandai oleh beberapa karakteristik, seperti peningkatan harga tanah, perubahan fisik penggunaan lahan, perubahan komposisi penduduk dan tenaga kerja.

Beesly (2010: 3-10), menjelaskan 4 karakteristik wilayah pinggiran sebagai berikut:

1. Sebelumnya merupakan wilayah pedesaan dengan dominasi lahan pertanian dan komunitas pedesaan;
2. Merupakan wilayah yang menjadi tujuan perkembangan kota dan pembangunan oleh *developer*;
3. Merupakan wilayah yang diinvasi masyarakat perkotaan dengan karakter sosial perkotaan;
4. Merupakan wilayah yang memiliki berbagai macam konflik, terutama antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang maupun antara petani dan *developer*.

Karakteristik lainnya dari wilayah pinggiran yang terlihat secara fisik adalah pola penyebaran perumahan yang berakar dari pola campuran antara ciri perkotaan dan pedesaan. Menurut Koestoer (1997:10-11), perumahan di pinggir kota yang dekat dengan desa membentuk pola yang spesifik di wilayah pinggiran. Pada saat pengaruh perumahan menjangkau wilayah pinggiran, pola perumahan menjadi cenderung lebih teratur daripada pola sebelumnya. Perubahan pola perumahan wilayah pinggiran dipengaruhi oleh adanya intervensi dari *developer* yang merupakan pihak pembangun perumahan baru di wilayah pinggiran.

Ditinjau dari aspek sosial masyarakat, wilayah pinggiran memiliki dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat kota yang melimpah ke daerah pinggiran atau mereka yang berurbanisasi, dan masyarakat pedesaan tradisional atau masyarakat lokal wilayah pinggiran.

### 2.1.2 Karateristik masyarakat wilayah pinggiran

Masyarakat wilayah pinggiran memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik masyarakat di wilayah yang bukan pinggiran. Berikut ini adalah karakteristik masyarakat wilayah pinggiran menurut Aji (2009:206-209):

a. Masyarakat lokal masih memiliki gaya hidup tradisional dan berpedoman pada budaya dan adat istiadat;
b. Masyarakat lokal mengalami pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian menjadi sektor perdagangan atau jasa;
c. Pada umumnya masyarakat pendatang tidak berbaur dengan masyarakat lokal dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah pinggiran terdiri dari dua kelompok masyarakat utama yaitu masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dari kota. Masyarakat lokal memiliki budaya pedesaaan yang kental dengan perilaku guyup (patembayan), berjiwa sosial tinggi, tidak individualis dan memiliki semangat kebersamaan tinggi. Sedangkan karakteristik masyarakat pendatang cenderung memiliki gaya hidup perkotaan yang lebih individualis, berorientasi pada profit dan berpendidikan tinggi.

Karakteristik masyarakat wilayah pinggiran pada umumnya lebih dikenal dengan solidaritas yang tinggi. Menurut Nasution (2009:11), solidaritas sosial yang dimiliki masyarakat pinggiran menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu maupun kelompok yang didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat pengalaman emosional bersama. Sumber solidaritas sosial adalah tradisi yang terawat dengan baik dari generasi ke generasi berikutnya dibawah kontrol sosial yang ketat. Nasution (2009:25) juga menjelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat wilayah pinggiran mengalami peralihan menuju perubahan dari sikap dan pandangan hidup tradisional menuju proses moderenisasi nilai atau norma sosial dan perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Secara umum karakteristik masyarakat wilayah pinggiran tersebut memiliki kaitan yang erat dengan daya dukung sosial. Karakteristik masyarakat lokal dan masyarakat pendatang yang tidak selalu sama dapat menjadi celah terjadinya konflik sosial yang menjadi salah satu indikator daya dukung sosial desa tersebut.

## 2.2 Pembangunan Perumahan oleh *Developer* di Wilayah Pinggiran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah pinggiran adalah wilayah yang memiliki lokasi strategis karena berada di pinggiran kota dan memiliki harga lahan yang lebih rendah daripada lahan perkotaan. Kondisi tersebut mendorong *developer* untuk membangun perumahan di wilayah pinggiran. Hal tersebut didukung dengan adanya alasan logis masyarakat yang menginginkan suatu lokasi yang tepat dan

menguntungkan sebagai tempat tinggal sehingga semua kebutuhan dapat terpenuhi secara mudah, murah dan cepat (Rusthon 1979: 13).

Tinjauan terminologi perumahan terdiri dari jenis-jenis perumahan. Pengertian perumahan dijelaskan di dalam Undang-Undang no 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan manusia. Perumahan sebagai bagian dari permukiman tidak hanya mengandung arti fisik tetapi juga non fisik. Suatu permukiman pada dasarnya merupakan bagian dari suatu wilayah dimana penduduk bertempat tinggal, berkiprah dalam kegiatan kerja dan usaha, berhubungan dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi berbagai kegiatan kehidupan (Djemabut 1986: 28)

Perumahan terdiri dari beberapa jenis atau tipe berdasarkan pihak yang membangun, pola perumahan dan eksklusifitas perumahan yang dibangun. Kuswartojo (2005: 104-105) menjelaskan terdapat dua jenis perumahan yaitu perumahan formal yang merupakan perumahan yang dibangun dengan aturan yang jelas dan memiliki pola teratur dan perumahan informal yang merupakan akumulasi rumah yang dibangun oleh keluarga atau individu tanpa mengikuti suatu aturan atau perencanaan formal yang diterbitkan oleh suatu otoritas. Fasilitas perumahan informal tidak dirancang atau disiapkan sebelumnya dan diupayakan oleh masing-masing keluarga atau individu.

Pada dasarnya perumahan terdiri dari perumahan teratur dan perumahan alami. Tipe perumahan menurut Djemabut (2004-11) meliputi perumahan teratur yaitu perumahan yang direncanakan dan dibangun dengan baik serta memiliki sarana, prasarana yang baik; perumahan tidak teratur yaitu perumahan yang berkembang tanpa direncanakan terlebih dahulu dengan pola tidak teratur dan sarana prasarana yang tidak lengkap; perumahan setengah teratur yaitu perumahan yang tidak sepenuhnya direncanakan dengan baik dimana jalan utama direncanakan dengan baik tetapi jalan kecil tidak direncanakan dengan baik.

Berdasarkan pengertian perumahan maka perumahan yang dibangun oleh *developer* dapat digolongkan kedalam perumahan teratur atau perumahan formal. Nasution (2009: 83-88) menyebutkan jenis perumahan yang dibangun *developer*

berdasarkan eksklusifitasnya adalah perumahan eksklusif yaitu perumahan yang dibangun oleh *developer* yang ditandai dengan adanya sistem masuk 1 akses (one gate system) atau dinding pembatas yang mengelilingi perumahan.

## 2.3 Masalah Pengembangan Wilayah Pinggiran

Wilayah pinggiran terbentuk oleh aspek sosial, ekonomi dan lingkungan antara kota dan desa sehingga seringkali menimbulkan permasalahan dalam pengembangan wilayah tersebut. Berikut ini adalah beberapa masalah di dalam pengembangan wilayah pinggiran (Nasution 2009:201):

a. Adanya konflik sosial di wilayah pinggiran karena perbedaan karakteristik antara masyarakat lokal dan pendatang;
b. Berkurangnya lahan pertanian akibat konversi lahan untuk perumahan yang menyebabkan petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian;
c. Bertambahnya kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk yang menyebabkan masyarakat lokal merasa tidak nyaman;
d. Adanya eksklusifitas perumahan baru yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat.

Aji (2009:213)menyebutkan bahwa perkembangan wilayah perkotaan ke arah wilayah pinggiran menyebabkan beberapa masalah, salah satunya adalah kerawanan pembangunan perumahan oleh *developer*. Lahan sawah sangat peka terhadap tekanan perambahan wilayah perkotaan yang mengkonversi lahan sawah menjadi lahan yang digunakan untuk perumahan dan infrastrutktur pendukung, pertumbuhan jumlah keluarga di wilayah pedesaan juga membutuhkan lahan baru untuk tempat tinggal dan pekarangan, persaingan penggunaan lahan dan produksi padi menjadi peroduksi tanaman lain yang lebih menguntungkan.

## 2.4 Aspek Sosial Dalam Pengembangan Wilayah Pinggiran

Salah satu aspek yang menjadi masalah krusial di dalam pembangunan wilayah pinggiran adalah aspek sosial. Aspek sosial di dalam kehidupan masyarakat wilayah pinggiran berkaitan erat dengan karakteristik masyarakat lokal yang cenderung bersifat kekeluargaan, homogen dan berpedoman pada norma dan budaya.

Pada dasarnya aspek sosial telah diakomodir di dalam pembangunan berkelanjutan. Selain aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan juga harus mengakomodir aspek kelembagaan. Jadi baik aspek sosial maupun aspek kelembagaan adalah bagian penting di dalam pembangunan wilayah pinggiran.

Masyarakat adalah bagian dari aspek sosial yang telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli. Masyarakat menjadi fokus di dalam kajian mengenai aspek sosial, termasuk di dalam pembangunan wilayah pinggiran karena masyarakat wilayah pinggiran terdiri dari 2 kelompok yang sangat berbeda karakteristik. Berikut ini adalah definisi masyarakat oleh beberapa ahli dalam Soekanto (2000:25):

a. *Mac Iver and Page*, menjelaskan mengenai definisi masyarakat sebagai suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia;
b. *Ralph Linton*, menjelaskan masyarakat yang merupakan suatu kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga dapat mengatur diri dan menganggap diri sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

## 2.5 Daya Dukung Lingkungan Wilayah Pinggiran

Konsep daya dukung lingkungan yang paling mendasar adalah menjelaskan hubungan antara ukuran populasi dan perubahan dalam sumber daya dimana populasi tersebut berada. Konsep ini sangat penting didalam memahami daya dukung lingkungan dalam berbagai konteks, termasuk di dalam konteks wilayah pinggiran.

Penentuan daya dukung lingkungan dapat dilakukan dengan membandingkan anatara suatu kegiatan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan di suatu wilayah. Secara umum terdapat empat tipe kajian daya dukung lingkungan menurut Inglis *et al.* (2000:12-13), yaitu:

1. Daya dukung fisik, yaitu luas total berbagai kegiatan pembangunan yang dapat didukung (*accommodated*) oleh suatu kawasan atau lahan yang tersedia;
2. Daya dukung produksi, yaitu jumlah total sumber daya alam (stok) yang dapat dimanfaatkan secara maksimal secara berkelanjutan;
3. Daya dukung ekologi adalah kuantitas atau kualitas kegiatan yang dapat dikembangkan dalam batas yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem;
4. Daya dukung sosial, yaitu tingkat kegiatan pembangunan maksimal pada suatu kawasan yang tidak merugikan secara sosial atau terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya.

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah daya dukung sosial. Berdasarkan konsep daya dukung oleh Inglis *et al.* terlihat bahwa konsep daya

dukung sosial pada dasarnya adalah mengukur tingkat toleransi masyarakat terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian maka tingkat toleransi tersebut diukur dari persepsi masyarakat.

## 2.6 Daya Dukung Sosial Wilayah Pinggiran

Pentingnya aspek sosial di dalam pengembangan wilayah perlu didukung dengan kajian mengenai daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini mencakup aspek-aspek sosial yang dapat menjadi pertimbangan di dalam pembangunan wilayah pinggiran.

### 2.6.1 Konsep daya dukung sosial

Pembangunan wilayah pinggiran tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang besar, wilayah pinggiran memiliki prospek pengembangan yang baik, tetapi hasil pembangunan tidak selalu dapat diterima oleh masyarakat. Aspek-aspek sosial perlu diakomodir agar pembangunan tidak melampaui daya dukung sosial wilayah.

Menurut Luna *et al.* (2004:486), daya dukung sosial adalah batas pembangunan dari setiap hirarki sosial dengan spasial yang nyata dan terbentuk oleh proses unilateral maupun multilateral. Sedangkan menurut Inglis *et al.* (2010:12-33), daya dukung sosial adalah level pembangunan maksimal suatu wilayah yang tidak merugikan secara sosial atau tidak menimbulkan konflik yang berarti harus dapat diterima secara sosial.

Berdasarkan konsep tentang daya dukung wilayah oleh Luna *et al.* dan Inglis *et al.*, dapat disimpulkan daya dukung sosial merupakan batas pembangunan maksimal yang masih dapat dilakukan untuk mengembangkan suatu wilayah. Saveriades (2000) menjelaskan bahwa pembangunan harus dapat diterima oleh suatu wilayah secara sosial dan tidak menimbulkan dampak yang tidak diterima oleh masyarakat. Kondisi ini berarti bahwa daya dukung sosial menunjukkan batas pembangunan yang masih dapat diterima secara sosial atau tidak menimbulkan konflik sosial dimana penerimaan atau toleransi masyarakat tersebut diukur dari persepsi masyarakat.

### 2.6.2 Variabel daya dukung sosial wilayah pinggiran

Daya dukung sosial merupakan gambaran dari aspek-aspek sosial suatu wilayah. Aspek-aspek tersebut akan menjadi indikator bagi penentuan daya dukung sosial. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Thaizong *et al.*(2011) dan Roussel & Valette (2007) merumuskan beberapa variabel daya dukung sosial, yaitu:

a. Pertumbuhan populasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, aspek sosial terbentuk oleh populasi masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itulah populasi menjadi salah satu indikator penting di dalam penentuan daya dukung wilayah. Populasi di wilayah pinggiran cenderung lebih rendah daripada di wilayah perkotaan, namun terdapat kecenderungan masyarakat perkotaan melakukan perpindahan menuju ke wilayah pinggiran untuk membangun tempat tinggal baru. Jadi pertumbuhan populasi yang menjadi variabel daya dukung sosial terdiri dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat perpindahan penduduk.

b. Penggunaan lahan dan infrastruktur wilayah

Penggunaan lahan ditinjau dari jenis dan luas penggunaan lahan, sedangkan infrastruktur ini ditinjau dari sarana dan prasarana yang tidak dapat diakses oleh masyarakat serta pelayanan sarana dan prasarana tersebut.

c. Keamanan sosial

Keamanan sosial dalam konteks daya dukung sosial ditinjau dari pendapatan dan tingkat pengangguran terutama yang disebabkan karena konversi lahan pertanian menjadi perumahan baru.

Berdasarkan beberapa konsep tentang daya dukung sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diuraikan indikator-indikator daya dukung sosial menurut Inglis (2000), Taylor (1982) dan Faturrochman & Widaningrum (1993), yaitu:

a. Ekonomi masyarakat

Ekonomi masyarakat pinggiran berkaitan erat dengan pola mata pencaharian yang biasanya menyesuaikan dengan kondisi alam yang masih memiliki lahan pertanian yang luas tetapi juga banyak yang bekerja di wilayah perkotaan. Jadi variabel daya dukung sosial dapat ditinjau dari ketenagakerjaan.

b. Konflik sosial

Menurut Brown (1998:46), konflik merupakan bentuk interaksi perbedaan kepentingan, persepsi dan pilihan. Wujud konflik dapat berupa ketidaksetujuan kecil hingga perkelahian. Jenis konflik menurut Daft (1998:483) terdiri dari *intergroup conflict* atau konflik antar kelompok yang meliputi konflik vertikal dan konflik horisontal dan *interdepartemental conflict* atau konflik antar departemen. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara level yang

berbeda dalam hirarki sosial sedangkan konflik horizontal terjadi antara level yang sama dalam hirarki sosial.

Jones (2001:422) menawarkan sebuah model, yang di beri nama *pody's* model untuk menganalisis dan menginterpretasikan situasi konflik. Pada tahap pertama dalam model ini, konflik belum muncul tetapi potensi untuk muncul telah ada. Tahap kedua yaitu konflik yang dapat diamati, dimulai ketika suatu kelompok merasa bahwa tujuan-tujuannya telah terganggu oleh aksi-aksi dari kelompok lain. Pada tahap ini, setiap kelompok mulai mengidentifikasi mengapa konflik bisa terjadi dan mulai menganalisis kejadian yang telah memicunya, biasanya pada titik ini konflik telah meningkat. Tahap ketiga adalah merasakan konflik *(Felt Conflict).* Pada tahap ini, kelompok-kelompok dengan cepat saling membangun tanggapan emosional. Pada umumnya masing-masing kelompok mengembangkan mental keberpihakan yang menimpakan kesalahan langsung pada kelompok lain. Seiring dengan peningkatan konflik, kerjasama dan interaksi antar kelompok menurun dan sering timbul pertengkaran antar kelompok. Bila konflik tidak diselesaikan akan meningkat pada tahap selanjutnya. Tahap keempat adalah manisfestasi konflik *(Manifest Conflict).* Pada tahap ini, kelompok yang berkonflik saling melawan melalui perusakkan tujuan-tujuan. Manifestasi konflik dapat berbentuk bermacam-macam. Manifestasi konflik harus dicegah karena bisa menyebabkan perpecahan dalam komunikasi dan karena konsekuensi yang diakibatkan oleh konflik. Tahap kelima adalah konsekuensi konflik *(Conflict Aftermath).* Pada akhirnya konflik akan teratasi bagaimanapun caranya. Bila sumber dari konflik belum teratasi, perdebatan dari masalah-masalah yang menyebabkan konflik, akan muncul kembali dalam konteks lain. Setiap tahap dari konflik meninggalkan konsekuensi yang dapat mempengaruhi cara kedua belah pihak dalam menerima dan menanggapi tahap konflik selanjutnya. Bila suatu konflik terselesaikan sebelum mencapai tahap manifestasi, maka konsekuensi akan mengakibatkan hubungan kerja yang baik di masa yang akan datang. Tetapi bila konflik tidak terselesaikan sampai pada tahap terakhir dari proses, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, konsekuensinya akan berakibat pada terbentuknya hubungan yang buruk dan tidak harmonis.

Mason & Rhicard (2005: 5) menjelaskan pemetaan konflik sebagai alat analisis konflik yang sesuai dipergunakan dalam penelitian ini karena pemetaan

konflik fokus pada isu, pihak yang terlibat konflik dan hubungan antar pihak tersebut. Pemetaan konflik adalah alat analisis yang sederhana dan sesuai diterapkan dalam penelitian yang singkat. Berikut ini adalah langkah analisis konflik (Mason & Rhycard, 2005: 5):

a. membuat daftar isu;
b. wawancara dengan tokoh kunci yang memahami konflik;
c. menentukan pihak yang terlibat konflik dan menggambarkan dalam bentuk lingkaran. Ukuran lingkaran merepresentasikan kekuatan pihak yang terlibat;
d. menggambarkan garis hubungan antar pihak;
e. menyimpulkan hasil analisis.

**Tabel 2.1 Pemetaan Konflik**

| Simbol Pemetaan Konflik | Keterangan |
|---|---|
| 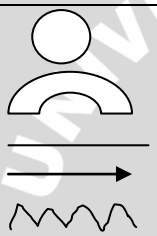 | Pihak yang terlibat konflik<br>Pihak di luar konflik yang melakukan intervensi<br>Garis hubungan baik dan kuat<br>Garis hubungan dengan dominasi satu pihak terhadap pihak lain<br>Garis konflik<br>Garis hubungan yang lemah |

Sumber: Mason & Rhycard (2005:5)

c. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi bagian penting untuk mengukur daya dukung sosial karena kelembagaan dapat berfungsi sebagai wadah bagi pendapat masyarakat mengenai pembangunan yang ada di wilayah pinggiran. Taylor mengakomodir aspek kelembagaan karena di dalam kelembagaan manusia dapat bekerja lebih efisien. Dengan demikian maka potensi terjadinya konflik dapat diminimalisir. Eaton (1986:56) menjelaskan bahwa lembaga sosial memiliki 3 fungsi utama, yaitu memberikan pedoman pada masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat dan memberikan pegangan pada masyarakat untuk melakukan sistem pengendalian sosial. Lembaga sosial dapat berupa lembaga lokal yang didalam Undang-Undang no. 32 tahun 2004 terdiri dari 5 bentuk, yaitu pemerintah lokal yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa; badan perwakilan desa (BPD); lembaga adat; badan usaha milik desa dan lembaga masyarakat. Lembaga-lembaga lokal tersebut harus dapat bekerja dan menjalankan fungsinya dengan baik agar tercipta lembaga yang kuat untuk mendorong wilayah yang kuat pula.

d. Budaya atau adat masyarakat

Kebudayaan adalah bagian yang sudah melekat di dalam masyarakat sebagai refleksi dari hasil cipta dan karsa manusia. Adanya pembangunan yang tidak mempertimbangkan budaya atau adat masyarakat seringkali tidak dapat diterima secara sosial. Hal tersebut berarti bahwa daya dukung sosialnya rendah. Kondisi adat dan budaya dijelaskan melalui pola Parson dan Toonies.

**Tabel 2.2 Pola Parsons dan Tonnies pada Analisis Adat Budaya**

| Budaya/adat | Tipologi Masyarakat | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Masyarakat lokal | | Masyarakat pendatang | |
| | Sikap | Orientasi Tindakan | Sikap | Orientasi Tindakan |

Sumber: Nasution (2009:98)

Keterangan:
Sikap : (+) menerima
(-) menolak

Orientasi tindakan: dasar individu dalam bersikap atau bertindak yang terdiri dari (Nasution, 2009: 52):

1) Orientasi kolektif, yaitu tindakan individu mengacu pada apa yang dianggap baik oleh masyarakat sesuai dengan nilai dan norma sosial. Tindakan individu dilakukan untuk kepentingan umum dan biasanya ditandai dengan adanya kerjasama individu dalam kelompok ;
2) Orientasi afektifitas, yaitu tindakan sosial didasarkan rasa empati yang tinggi dan mau memperhatikan masalah orang lain. Tindakan yang berorientasi afektifitas ditandai adanya unsur kasih sayang dan perasaan yang dominan;
3) Orientasi netralitas afektif, yaitu tindakan individu didasarkan pada rasionalitas dan ditandai dengan diabaikannya unsur perasaan dalam bertindak;
4) Orientasi diri, yaitu tindakan individu didasarkan pada kepentingan untuk diri sendiri yang berarti individu melakukan tindakan jika dapat memberikan keuntungan pada dirinya;
5) Orientasi selektifitas, yaitu tindakan individu didasarkan pada golongan atau kelompok masyarakat tertentu yang diistimewakan. Tindakan ini ditandai dengan adanya aturan khusus dalam bertindak terhadap kelompok tertentu.

Pada dasarnya indikator daya dukung sosial baik menurut Thaizong (2011) maupun Inglis (2000) memahami aspek sosial sebagai bagian penting di dalam

penentuan daya dukung sosial. Berdasakan studi terdahulu maka indikator daya dukung sosial wilayah pinggiran adalah sebagai berikut:

a. Sosial, meliputi tingkat pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk masuk, kelembagaan, adat budaya dan konflik sosial;
b. Ekonomi, meliputi ketenagakerjaan dan pendapatan;
c. Fisik binaan, meliputi penggunaan lahan, sarana dan prasarana wilayah.

Selanjutnya indikator-indikator tersebut akan dianalisis untuk mengetahui daya dukung sosial. Kemudian dapat ditentukan rekomendasi terkait pembangunan wilayah pinggiran berdasarkan daya dukung sosial desa.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan di dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Thaizong *et al* (2011) dan Roussel & Valette (2007) serta Peyton *et al* (2007) terkait daya dukung sosial. Hal-hal yang diakomodir dalam penelitian ini adalah variabel penelitian dan metode penelitian.

Di dalam penelitian mengenai daya dukung wilayah pinggiran ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu dimana metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis berbeda dengan kedua penelitian terdahulu. Namun terdapat beberapa variabel yang diakomodir di dalam penelitian ini yang telah diklasifikasikan menjadi indikator daya dukung sosial seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

| Peneliti | Tujuan | Variabel | Sub variabel | Metode Analisis | Output | Perbedaan dengan Penelitian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaizong *et al* (2011) | Mengukur daya dukung komprehensif (lingkungan, sosial, ekonomi dan sumber daya) di provinsi Heibei, China (wilayah perkotaan) | • Sumber daya air<br>• Sumber daya lahan<br>• Pengelolaan lingkungan<br>• Tingkat ekonomi<br>• Perkembangan populasi<br>• Keamanan sosial<br>• Tingkat pembangunan infrastruktur | • Supply-demand kebutuhan air dan lahan<br>• Tingkat emisi COD dan $SO_2$<br>• produktifitas tenaga kerja<br>• tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi<br>• tingkat pengangguran<br>• pendapatan per kapita | • GIS untuk mengevaluasi daya dukung lingkungan<br>• AHP untuk mengetahui bobot setiap indikator daya dukung | Daya dukung komprehensif dan kontribusi masing-masing daya dukung | • Dalam penelitian ini wilayah penelitian adalah wilayah pinggiran.<br>• Variabel penelitian yang berbeda adalah adanya variabel konflik sosial dan kelembagaan.<br>• Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis daya dukung sosial menggunakan analisis sebaran frekuensi<br>• Output penelitian adalah daya dukung sosial wilayah pinggiran |
| Roussel & Valette (2007) | Mengukur daya dukung sosial wilayah pesisir di Thau Lagoon, Prancis (wilayah pesisir) | • Polusi udara<br>• Limbah rumah tangga<br>• Konsumsi air dan energy<br>• Penggunaan lahan<br>• Populasi dan infrastruktur | • Kualitas udara dan air<br>• Lokasi pembuangan limbah dan polusi<br>• Supply-demand air dan energy<br>• Tingkat urbanisasi<br>• Penggunaan lahan<br>• Kondisi sarana-prasarana | • Driver Pressure State Impact Response (DPSIR) untuk mengetahui hubungan antara aktifitas manusia dengan degradasi lingkungan | Daya dukung sosial wilayah pesisir | |
| Peyton *et al* (2007) | Mengukur daya dukung sosial wilayah hutan Michigan | • Kependudukan<br>• Manfaat dan dampak kehidupan hutan | • Usia, pendidikan dan jenis kelamin<br>• Manfaat<br>• Dampak | • Analisis kluster untuk mengkelompokkan tingkat toleransi | daya dukung sosial wilayah hutan Michigan | |

## 2.8 Kerangka Teori

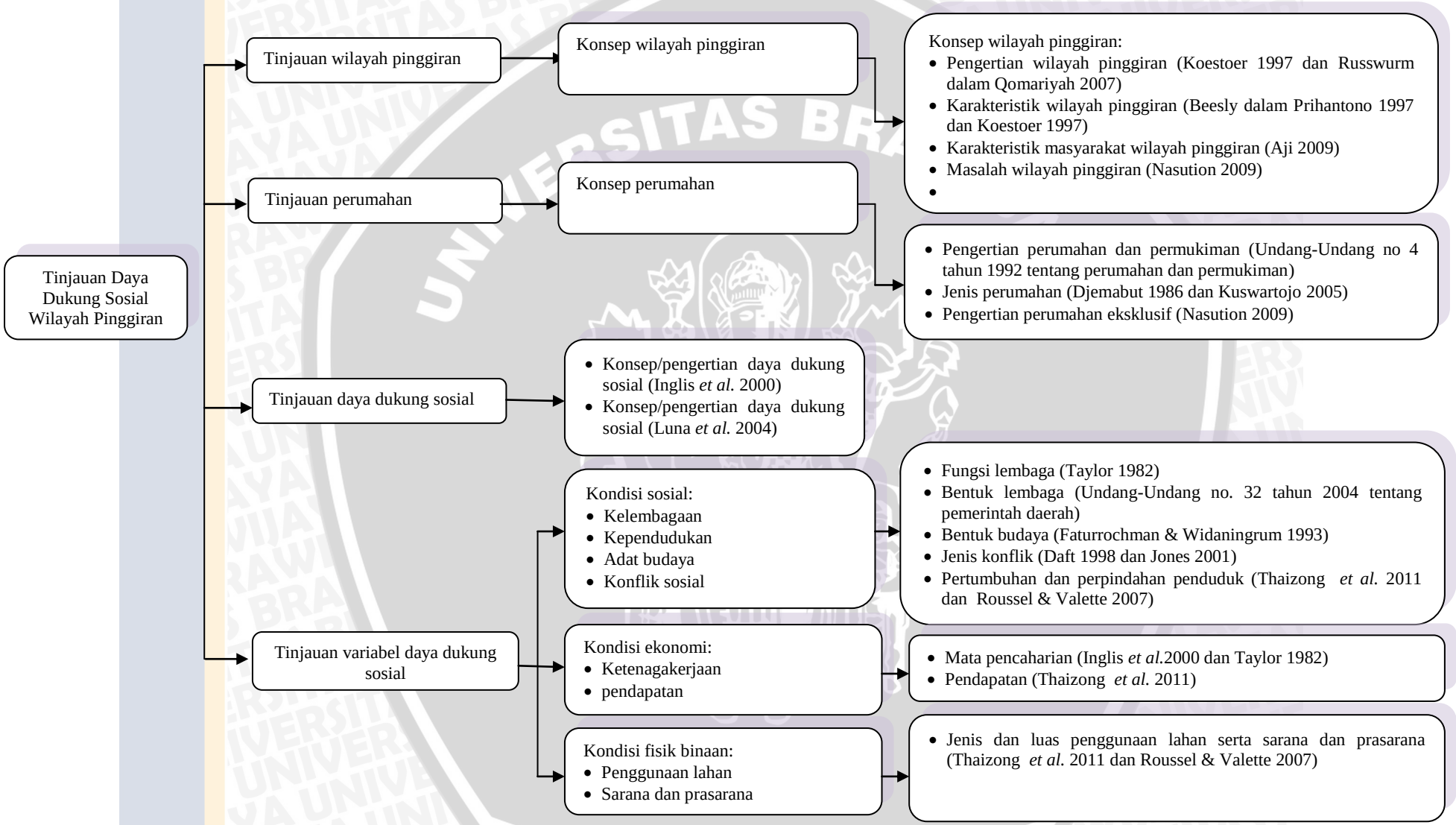


**Gambar 2.2 Kerangka Teori**

repository.ub.ac.id




UNIVERSITAS BRAWIJAYA